



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 16 /V.09/HK/2020**

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah yang berperspektif gender dan upaya peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 huruf k Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan** : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender dengan susunan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memuat:
- a. Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah; dan
 - d. Penguatan peran serta masyarakat di daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

- 1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI di Jakarta;
- 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 161 / V.09 / HK/2020
 TANGGAL : 16-3-2020

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINSI LAMPUNG

Prasyarat	Indikator		Pemetaan dan Rencana Aksi			
	Indikator	Ukuran	Kondisi saat ini	Masalah	Rencana Tindak	
					2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1. Komitmen	1.1 Kebijakan Daerah tentang PUG daerah	Perda PUG di daerah :	Ada Perda No. 10 Tahun 2011 Tentang PUG dalam Pembangunan Daerah	Implementasi belum Maksimal	Maksimalisasi Implementasi Perda No. 10 Tahun 2011	Maksimalisasi Implementasi Perda No. 10 Tahun 2011
		Peraturan Gubernur /Peraturan Bupati/Walikota Tentang	Ada 1. Pergub No. 11 Tahun 2018 Tentang PUG dalam pembangunan Provinsi Lampung 2. Pergub No. 64 Tahun 2018 tentang RAD PUG	Belum tersosialisasi/advokasikan kepada Para Kepala OPD, Anggota DPRD, Lembaga Masyarakat(LM), Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita/Gender (PSW/G) dan Dunia Usaha/swasta	melakukan Sosialisasi tentang Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2018 tentang PUG dalam Pembangunan Provinsi Lampung	Implementasi Pergub
	1.2. Kebijakan pelaksanaan PUG dari Kepala daerah/KaOPD	Instruksi Kepala daerah tentang PPRG	Ada, Instruksi Gubernur No.INST/02/G.VIII/HK/2002 ttg PUG dalam Pembangunan Daerah	Sudah ada Perda dan Pergub tentang PUG	-	-
	1.3.Rencana pencapaian PUG di masing-masing OPD	SE Sekda atau Ka Bappeda tentang target dan rencana pencapaian PUG di masing-masing OPD	Ada, Surat Edaran Sekda Provinsi Lampung No. 045.2/3093/V.08/2019 tentang Pelaksanaan ARG			
2. Kebijakan	2.1.Dokumen Ren (Renstra,Renja)	Renstra Dinas PPPA yang memuat:	Perda No. 10 TH.2011 ttg PUG	-	-	-

		- Adanya dasar hukum PUG	dlm Pembangunan Daerah			
		- Adanya data terpilah	Pada Bab II Renstra DPPPA			
		- Visi dan Misi	Ada Visi : Rakyat Lampung Berjaya	Pelaksanaan Visi	Implementasi Visi	Implementasi Visi
			Misi ke 3 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Penyandang Disabilitas	Pelaksanaan Misi	Implementasi Misi	Implementasi Misi
		-Program dan kegiatan yg mendukung PUG;	Ada, Pada Bab VI Renstra DPPPA	Pelaksanaan Program	Optimalisasi Pelaksanaan Program	Optimalisasi Pelaksanaan Program
		-Adanya indikator gender	Ada, Pada Bab VI Renstra DPPPA			
	2.2.Renstra OPD	Persentase Renstra OPD yang memuat:				
		- Adanya dasar hukum PUG	Dalam proses	Belum finalisasi renstra OPD	Melakukan evaluasi dan monitoring integrasi program dan kegiatan PUG dalam renstra OPD	Memasukkan PUG sebagai salah satu strategi setiap OPD
		- Adanya data terpilah	Ada	Up dating data OPD belum maksimal	OPD melakukan perbaikan data terpilah pada masing-masing program dan kegiatan	OPD melakukan perbaikan data terpilah pada masing-masing program dan kegiatan
3.Kelembagaan	3.1 Unit Organisasi yang menangani PUG di daerah	Es 3, Es 2, Non Es	Ada SK Kabid, Kasubbid dan staf	Adanya Pergantian SDM (Rolling)	Melaksanakan Bimtek secara kontinyu bagi SDM	Melaksanakan Bimtek secara kontinyu bagi SDM

	3.2. Adanya Pokja PUG di Daerah	SK tentang POKJA dari Kepala Daerah	Ada, SK. Gubernur No. G/294/V.08/HK/2017 TTG Pembentukan POKJA PUG Tahun 2015-2019	POKJA PUG belum berjalan secara maksimal	yg menangani PUG Memaksimalkan Tupoksi Pokja PUG	yg menangani PUG Memaksimalkan Tupoksi Pokja PUG
	3.3. adanya Focal Point dimasing-masing OPD	- Jumlah OPD yang mempunyai Surat Penunjukan Focal Point dari Kepala OPD	Ada, 51 OPD	Focal Point PUG di OPD belum berjalan secara maksimal	Memaksimalkan Focal Point PUG di OPD	Memaksimalkan Focal Point PUG di OPD
		- Persen OPD yang mempunyai focal point	100%	-	-	-
	3.4. Adanya rencana aksi pelaksanaan PUG di daerah	SK Kepala daerah tentang RAD PUG	Peraturan Gubernur No. 64 Tahun 2018 Tentang RAD PUG, dan Pergub Tahun 2020 Masih Dalam Proses	Sedang Dalam Proses Pergub RAD Pokja PUG tahun 2020	Implementasi terhadap RAD Pokja PUG Th.2020	Implementasi terhadap RAD Pokja PUG Th.2020
4. Sumber Daya	4.1. Perencana yang mahir	Ada, Jumlah perencana pada 51 OPD yang mendapatkan sertifikat	51 Perencana	Sering terjadi Mutasi Pegawai dan Perencana OPD belum memahami sepenuhnya tentang PPRG	Melaksanakan Pelatihan bagi perencana di OPD Tentang PPRG	Melaksanakan Pelatihan bagi perencana di OPD Tentang PPRG
	4.2. Auditor yang mempunyai sertifikat	Ada, Jumlah auditor yang mendapat sertifikat	30 orang	Auditor yang telah dilatih belum maksimal dalam melaksanakan Audit PPRG	Auditor yang dilatih akan melaksanakan Audit PPRG pada OPD	Auditor yang dilatih akan melaksanakan Audit PPRG pada OPD
	4.3. Anggaran fasilitasi PUG di daerah	•Jumlah alokasi anggaran fasilitasi PUG	Rp. 397.999.800	Anggaran kurang untuk fasilitasi PUG	Dukungan Anggran Dekon untuk Fasilitasi PUG di Daerah	Dukungan Anggran Dekon untuk Fasilitasi PUG di Daerah

Prasyarat	Indikator		Pemetaan dan Rencana Aksi			
	Indikator	Ukuran	Kondisi Saat Ini	Masalah	Rencana Tindak	
					2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	4.4 Jumlah Fasilitator di Daerah	•Jumlah faslilitator yang mendapat sertifikat	6 orang	Masih Kurang Fasilitator	Provinsi mengajukan Rekomendasi TOF kepada Pusat	Provinsi mengajukan Rekomendasi TOF kepada Pusat
		•Ratio fasilitator terhadap jml Kabupaten + OPD	40%	Masih Kurang Fasilitator		
	4.5. Jumlah Gender Champion	•Jumlah orang yg memenuhi kriteria	Kurang Lebih 50 Orang	Belum ada dasar/pedoman tentang Gender Champion	Dukungan dan aturan dari Kementerian PPPA dan mengenai dasar dan Standar Gender Champion	Dukungan dan aturan dari Kementerian PPPA dan mengenai dasar dan Standar Gender Champion
5.Data dan sistem informasi	5.1. Pengelola data yang mahir	Jumlah pengelola data OPD yang mendapat sertifikat	belum ada pengelola data yang bersertifikasi	Belum adanya pelatihan yang bersertifikasi bagi pengelolaan data	Pelatihan Pengelola data yang bersertifikaasi dengan dukungan anggaran dekon	Pelatihan Pengelola data yang bersertifikaasi dengan dukungan anggaran dekon
	5.2. Statistik gender/ profil gender di daerah	Adanya profil gender di daerah	Sudah ada	Perlu up dating data gender	Mengupdating data gender dan mengal.tifkan forum data	Mengupdating data gender dan mengaktifkan forum data
	5.3. Data terpilah dimasing-masing OPD	Jumlah OPD yang mempunyai data yang relevan menurut jenis kelamin	Ada, 51 OPD	Masih lemahnya OPD dalam menggunakan data terpilah dalam pembuatan GBS	Menggunakan data terpilah untuk pengambilan kebijakan dan sebagai alat analisis gender (GAP dan GBS)	Menggunakan data terpilah untuk pengambilan kebijakan dan sebagai alat analisis gender (GAP dan GBS)
	5.4. Mekanisme/sistem informasi	Ada mekanisme/sistem informasi	Ada	Belum optimal sistem informasi	Optimalisasi data siga dan simfoni	Optimalisasi data siga dan simfoni

Prasyarat	Indikator		Pemetaan dan Rencana Aksi			
	Indikator	Ukuran	Kondisi Saat Ini	Masalah	Rencana Tindak	
					2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
6. Metode/Tool	6.1. Pedoman Teknis pelaksanaan PUG di daerah	Pedoman Teknis pelaksanaan PPRG di daerah	Ada Panduan Pedoman Teknis PPRG, Modul Pelatihan PPRG Alat Analisis Gender (GAP) dan Panduan Penyusunan Data Terpilah	Belum tersosialisasi pedoman Teknis Pelaksanaan PPRG	Optimalisasi Pedoman teknis pelaksanaan PPRG pada OPD dan stakeholder Kab/Kota	Optimalisasi Pedoman teknis pelaksanaan PPRG pada OPD dan stakeholder Kab/Kota
	6.2. Modul PUG/PPRG Daerah	Modul pelatihan PPRG di daerah	1. Ada modul pelatihan PUG/PPRG yang diterbitkan	Anggaran belum tersedia untuk memperbanyak modul	Memperbanyak modul PPRG	Memperbanyak modul PPRG
			2. Ada modul Teknis Pelaksanaan PUG	Anggaran belum tersedia untuk memperbanyak modul	Memperbanyak modul pelaksanaan PUG	Memperbanyak modul pelaksanaan PUG
			3. Ada modul Pedoman Audit yang repopnsif gender yang diterbitkan	Anggaran belum tersedia untuk memperbanyak modul	Memperbanyak modul PPRG dan modul auditor responsif gender	Memperbanyak modul PPRG dan modul auditor responsif gender
	6.3. Metode analisis gender yang digunakan daerah	Pedoman Teknis analisis gender GAP di daerah	Ada, Metode Alat Analisis gender dengan GAP dan GBS	Belum memahami Pedoman Teknis	Memberikan Modul Pedoman Teknis	Memberikan Modul Pedoman Teknis
	6.4. Pedoman Audit yang reponsif gender	Panduan/manual pengawasan PPRG di daerah	Ada	Ketersediaan Modul kurang karena anggaran belum tersedia	Memperbanyak Modul Panduan Pengawasan PPRG di Daerah	Memperbanyak Modul Panduan Pengawasan PPRG di Daerah
		Ada buku-buku terbitan yang berkaitan dengan PUG di daerah	Ada	Ketersediaan Modul kurang karena anggaran belum tersedia	Memperbanyak buku-buku yang berkaitan dengan PUG	Memperbanyak buku-buku yang berkaitan dengan PUG

Prasyarat	Indikator		Pemetaan dan Rencana Aksi			
	Indikator	Ukuran	Kondisi Saat Ini	Masalah	Rencana Tindak	
					2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
		Jumlah jenis bahan KIE untuk promosi PUG	Ada	Ketersediaan Modul kurang karena anggaran belum tersedia	Memperbanyak bahan KIE	Mengusulkan anggaran pembuatan Modul
7. Peran serta masyarakat dan jejaring	Jumlah LM, PSW/G, dan dunia usaha yang terlibat dalam kegiatan gender didaerah atau kegiatan yang responsif gender	LM/PSW/Dunia usaha yang terlibat dalam POKJA PUG	Ada 12 LM/PSW/Dunia Usaha yang terlibat dalam POKJA PUG, yaitu : 1. PSW/LPPM UNILA, UIN RADIN INTAN 2. Lembaga Advokasi DAMAR 3. Lembaga Advokasi Anak (LADA) 4. BKOW Provinsi Lampung 5. Kaukus Perempuan Parlemen 6. Kaukus Perempuan Politik 7. Aisiyah 8. Muslimat NU 9. IWAPI Lampung 10. Batik UNA Lampung 11. Waway Tapis Lampung 12. Keripik Panda Tirai	Lembaga organisasi perempuan, perguruan tinggi dan dunia usaha belum maksimal dalam pelaksanaan PUG di OPD	Optimalisasi koordinasi dengan jejaring	Optimalisasi koordinasi dengan jejaring
		Jumlah LM/PSW/G yang terlibat dalam melakukan penelitian/kajian terhadap pelaksanaan PUG	7 (tujuh) Perguruan Tinggi yaitu Unila, UIN, Umitra, UBL, UTL, Darmajaya dan Saburai	Keterlibatan belum maksimal	Optimalisasi koordinasi dengan jejaring	Optimalisasi koordinasi dengan jejaring
		Jumlah LM/PSW/Dunia Usaha yang diundang atau terlibat dalam kegiatan PUG di daerah	Ada 12 LM/PSW/Dunia Usaha	Belum optimal peran serta LM/PSW/Dunia Usaha dalam kegiatan PUG	Memperluas jejaring dengan LM/PSW/Dunia Usaha untuk pelaksanaan kegiatan PUG di OPD	Memperluas jejaring dengan LM/PSW/Dunia Usaha untuk pelaksanaan kegiatan PUG di OPD
		Jumlah LM/PSW/Dunia	Ada 12 LM/PSW/Dunia Usaha	Belum optimal peran serta LM/PSW/Dunia Usaha dalam.	Memperluas jejaring dengan LM/PSW/Dunia	Memperluas jejaring dengan LM/PSW/Dunia

		Usaha yang diundang atau terlibat dalam kegiatan yang responsif gender		kegiatan responsif gender	Usaha untuk pelaksanaan kegiatan di OPD yang responsive gender	Usaha untuk pelaksanaan kegiatan di OPD yang responsive gender
II. ↑ PELAKSANAAN						
1. Kebijakan program dan kegiatan yang RG	1.1. Kebijakan Daerah yang responsif gender	Perda yang reponsif gender yang diterbitkan dalam 2 tahun terakhir	Ada, 4 Perda dan 4 Pergub			
	1.2. Program Pembangunan Daerah yang reponsif gender	Jumlah program yang responsive gender yang ditetapkan dalam 2 tahun terakhir	15 Program	Perlunya tambahan program dari OPD	Pemetaan Program dari OPD	Pemetaan Program dari OPD
		Persen terhadap semua program				
	1.3. Jumlah kegiatan pembangunan daerah yang responsive gender yang dilaksanakan	Jumlah GBS kegiatan di OPD dalam 2 tahun terakhir	58 kegiatan GBS	Masih ada OPD yang belum menyampaikan GBS dari Kegiatan OPD	Melakukan pengumpulan GBS dari kegiatan OPD	
Kelembagaan	Jumlah kab/kota yang difasilitasi dengan anggaran Provinsi	Jumlah dan persentase Kab/Kota yang difasilitasi	100%	Kurang maksimal fasilitasi Kab/Kota keterbatasan anggaran APBD	Dukungan anggaran dekon untuk fasilitasi Kab/Kota	Dukungan anggaran dekon untuk fasilitasi Kab/Kota
	Jumlah daerah lain yang belajar PUG di Provinsi	Jumlah Provinsi dan Kab/Kota	Tidak ada			
	Jumlah P2TP2A	Jumlah P2TP2A	Ada, 15 Kab/Kota dan Prov			
	Kantor OPD yang mempunyai ruang day care/Laktasi	Jumlah Kantor yang mempunyai Ruang Day Care/Laktasi	Ada, 12 ruang Day Care	Masih kurangnya OPD dalam mengadakan ruang Day Care	Optimalisasi pembuatan Ruang Day Care pada OPD yang belum memiliki	Optimalisasi pembuatan Ruang Day Care pada OPD yang belum memiliki

Prasyarat	Indikator		Pemetaan dan Rencana Aksi			
	Indikator	Ukuran	Kondisi Saat Ini	Masalah	Rencana Tindak	
					2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
3. Anggaran	ARG	• Jumlah anggaran Pemda yang responsive gender	Rp. 21.113.176.456 (2019) Rp. 27.666.061.100 (2020)	Kurangnya anggaran Pemda yang RG	Dukungan Dana Pemda	
		• Persen ARG terhadap seluruh anggaran				
		Jumlah program/kegiatan yang mengikuti LM/PT/Dunia Usaha	6 Program	Belum maksimalnya pelaksanaan program	Koordinasi program antara Pemda dengan LM/PT/Dunia Usaha	
4. Peran serta masyarakat	Lembaga masyarakat yang ikut dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang responsive gender	Jumlah kajian/penelitian yang dilakukan LM/PSW/dunia usaha ttg gender atau PUG dalam pembangunan	Ada, 10 kajian	Belum optimal pemanfaatan kajian	Memfaatkan hasil kajian dari PT untuk pengambilan kebijakan	
		Jumlah pelatihan/advokasi PPRG yang melibatkan LM/PT/dunia usaha	14 pelatihan	Kurangnya pelatihan dan advokasi	Melakukan pelatihan dan advokasi dengan fasilitasi Kemen PPPA	
		Jumlah program/kegiatan yang mengikuti LM/PT/ dunia usaha				

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI